

# EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 2 No. 2 Tahun 2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

## **PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (Studi Di Kecamatan Dumoga Timur)**

*Claudia Loreyna Kawengian<sup>1</sup>**Novie Pioh<sup>2</sup>**Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Demokrasi merupakan salah satu parameter yang menjadikan Negara itu kuat dengan memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam setiap kehidupannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Fokus penelitian menggunakan teori Miriam Budiardjo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2017 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat yang ada di Kecamatan Dumoga Timur begitu antusias dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilukada secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain.

**Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Perwujudan demokrasi di tingkat lokal salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilukada di daerah-daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakil Bupati/wakil Walikota. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Di era reformasi, partisipasi politik memegang peranan penting dalam terselenggaranya Pemerintah dan demokrasi baik di Pusat maupun di Daerah. Partisipasi politik secara umum merupakan kegiatan Warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai Warga Negara. Partisipasi politik merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah satu hal yang sangat mendasar dalam proses Demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sebagaimana Pesta demokrasi (pemilukada) di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dimana akan adanya persaingan antara para calon, dengan menyiapkan cara untuk bisa menarik hati dari masyarakat sesuai dengan kreatifitas masing-masing calon. Banyak cara untuk bisa membuat masyarakat bisa merasa simpati kepada para calon, yaitu dengan adanya berkampanye, menghadiri setiap acara yang dibuat oleh masyarakat dan memasang Baliho/spanduk. Dari beberapa calon mempersiapkan berbagai cara untuk bersaing memperebutkan suara dari para pemilih yang ada di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan masyarakatpun

semakin sulit untuk bisa menentukan pilihan mereka, masyarakat pun melihat sosok kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati lewat wibawa mereka untuk memimpin. Terutama bagi pemilih pemula yang tergolong remaja yang berusia 17 tahun atau lebih, yang sudah/perna menikah yang mempunyai hak untuk memilih. Karena itu setiap calon Bupati dan Wakil Bupati berkunjung ke setiap tempat yang menjadi wilayah Kabupaten, agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung dan bisa dikenal oleh masyarakat. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini, tak jarang juga didapati banyak pemilih yang mendapatkan bingkisan, uang, sembako, dan lain sebagainya (yang sebenarnya tidak diperbolehkan) dari tim sukses para kandidat calon Bupati, dengan maksud untuk bisa menarik simpati dari masyarakat untuk bisa mendapatkan suara yang banyak dalam Pilkada terutama bagi para pemilih pemula.

Pemilih pemula dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pemilih pemula adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, yang di sebut pemilih pemula ini adalah yang berusia (17 - 21 tahun), atau yang belum sama sekali memilih dalam pemilihan umum, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, karena mereka belum memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun bukan berarti mereka tidak dapat mencerminkan aspirasi mereka dalam bidang politik, tetapi mereka tetap melaksanakan hak pilih mereka di

tempat pemilihan. Partisipasi politik pemilih pemula yang saat ini sangat menarik untuk diamati, karena kita ketahui bersama bahwa pemilih pemula adalah objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tepat termasuk didalamnya pemilih pemula. Oleh karena itu kegiatan politik bagi pemilih pemula menjadi penting karena kegiatan ini bukan hanya pada soal mencoblos tanda atau gambar dari pasangan calon namun kesadaran dan pendewasaan politik yang perlu ditumbuhkan sejak awal melalui sosialisasi politik.

Keberadaan pemilih pemula terkadang menjadi penyebab kurangnya partisipasi politik karena melihat realita yang terjadi sebagian besar pemilih pemula belum mengetahui proses politik, bingung menentukan pilihan, ketidaktahuan mereka terhadap partai politik, visi misi partai politik dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih masih rendah. Dilihat dari tingkat kesadaran para pemilih pemula dalam pilkada, menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada kurangnya pengalaman dan pemahaman belajar berpolitik, yang masih terbelah dengan kelompok apatis, apolitis, dan kritis terhadap pemilu. Adapun pemilih pemula yang menggunakan hak pilih mereka untuk berpartisipasi lewat pesta Demokrasi, selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih pemula menggunakan hak pilihnya karena sebagian dari pemilih pemula memiliki harapan yang besar dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk memajukan bangsa akan tetapi ada juga hanya sekedar ikut-ikutan, memilih hanya sekedar faktor popularitas.

Karena dari cara mereka melihat hal ini masih belum terbiasa dikarenakan ada begitu banyak pengaruh-pengaruh mulai dari kalangan keluarga, kerabat yang ada dilingkungan sekitarnya, sehingga berpengaruh dalam mereka mengambil keputusan dalam memilih calon Bupati dan Wakil Bupati. Adapun pemilih pemula ini melihat cara pendekatan dari pada kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati dengan berpolitik uang (money politik). Adapun mereka dipaksa/dibujuk dengan honor yang besar, pendidikan dan kesehatan gratis. Lewat pilkada ini dapat dilihat bagaimana partisipasi politik para pemilih pemula untuk menggunakan hak suara dalam menyukseskan pemilihan umum di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2017, sesuai dengan hasil perolehan suara yang di dapat sebesar 167.551, di antaranya 86.761 adalah pemilih laki-laki, dan 80.790 adalah pemilih perempuan. Yang dimana terdapat Pemilih pemula sebanyak 5.469 jiwa, yang didalamnya pemilih perempuan 2.726, dan pemilih laki-laki 2.743 yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Kecamatan Dumoga Timur adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan, yang memiliki jumlah pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.244, dan memiliki jumlah pemilih pemula sebanyak 538 jiwa, yang diantaranya pemilih perempuan 271, dan pemilih laki-laki 267 yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Kecamatan Dumoga Timur pada waktu pemilihan memiliki perolehan suara sesuai Nomor urut, dengan Nomor urut 1 memiliki

jumlah 8.075 suara, sedangkan Nomor urut 2 memiliki jumlah 4.340 suara, jadi pada pemilihan di Kecamatan Dumoga Timur di menangkan oleh pasangan calon Nomor urut 1, yaitu Yasti dan Yanny. Hasil perolehan suara berdasarkan penghitungan yang diperoleh oleh kedua Calon yaitu dengan Nomor urut 1 Dra.Hj. Yasti S Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk, 89.091 suara/ (64,88%), dan dengan Nomor urut 2 Hj. Salihi Mokodongan dan Jefri Tumelap, 48.224 suara/ (35,12%). Jadi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah dilaksanakan pada Tanggal 15 februari Tahun 2017 di menangkan oleh pasangan Calon Nomor urut 1 yaitu Hj. Yasti S Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk.

## Tinjauan Pustaka

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting Demokrasi. Asumsi yang mendasari Demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Akan tetapi, keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Menurut Miriam Budiardjo (Anwar Arifin 2015:78) mengatakan bahwa partisipasi politik secara Umum dapat didefinisi sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi kebijakan public (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Selanjutnya Menurut Samuel P. Hungtinton dan Johan M. Nelson (Miriam Budiardjo 2008: 368) partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Menurut Tami Legowo (Sitepu 2012:93) partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga Negara yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan system politik atau pemerintah. Dalam hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok, secara spontan maupun dimobilisasi legal maupun ilegal sifatnya. Selanjutnya Hebert McClosky (Sinaga 2013:52) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum. Oleh sebab itu, di Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasi tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan

bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo 2008: 369). Mengacu pada pendapat para ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalam Negeranya yang ikut melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik maupun Pemerintahan yang ada didalam Negeranya.

Menurut Adman Nursal (Bakti, 2012;129) mengatakan bahwa pemilih pemula atau pemilih muda setidaknya memiliki dua makna penting:

1. Menjadi medan perebutan suara dalam pemilu.
2. Sekmen ini menjadi penentu ramai tidaknya rapat umum partai politik yang memiliki makna penting untuk publikasi maupun mempengaruhi calon pemilih lainnya.

Secara umum (Bakti 2012;130). Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih yang lainnya. Namun, preferensi mereka seringkali dinilai baru pada tahap penerimaan (aksestabilitas) dan belum sampai pilihan politik (elektabilitas). Mereka seringkali digambarkan sebagainya:

- a. Pemilih yang masih labil dan cenderung apatis
- b. Pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang relatif rendah
- c. Pemilih yang cenderung didominasi oleh kelompok (peer group)
- d. Pemilih yang melakukan pilihan karena aspek popularitas partai politik atau calon yang diusulkan partai politik
- e. Pemilih yang datang ketempat pemungutan suara (TPS) hanya sekedar untuk membatalkan atau menggugurkan haknya.

Namun, terlepas dari gambaran tersebut, keinginan mereka dalam berpartisipasi saat memberikan suara pada penyelenggaraan pemilu merupakan potensi yang cukup signifikan. Selain besarnya jumlah pemilih pemula, potensi untuk memperoleh suaranya mereka dapat dilihat dari antusiasmenya dalam mengikuti pemilu pertama kali. Menurut Nur Budi Hariyanto (Bakti 2012:127) merupakan potensi signifikan bagi kontestan pemilihan umum (pemilu) untuk mendulang suara untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam politik. Karena itu, hanya dieksploitasi untuk kepentingan politik, namun terlihat aktif dalam tatanan demokrasi. Menurut Imam Gusnaldi dalam (Anugraha 2013:8) didalam pemilu terdapat 3 cara untuk membaca perilaku pemilih menurut usia yaitu:

1. Pemilih Pemula (17-21 Tahun) Rata-rata terdiri dari 20-30 persen pemilih.

Pemilih pemula tidak memiliki kepedulian untuk memilih akan tetapi mudah dipengaruhi. Tidak untuk diarahkan memilih akan tetapi mudah diarahkan untuk provokasi, bertindak anarkis bahkan merusak suasana lingkungannya serta dapat mempengaruhi kebijakan. Secara psikologis pemilih pemula suka ramai-ramai sehingga yang dapat mempengaruhi mereka untuk memilih adalah mereka yang dianggap tokoh dan idola (artis, orang tua, dll) dikarenakan minimnya pendidikan politik dan begitu banyaknya beban pendidikan yang harus dikerjakan.

2. Pemilih Dewasa (21-50 Tahun) Rata-rata terdiri dari 30-40 persen pemilih.

Pemilih dewasa lebih cenderung dan sejalan ketidakpercayaan mereka terhadap perubahan yang selalu tidak menampakan perbaikan setelah proses

pemilu. Pemilih dewasa cenderung lebih dewasa dalam memberi perbedaan yakni dari perbedaan pendapat. Mereka pemilik massa pemilih dalam konteks politik tidak bertujuan alias mengambang. Mereka cenderung terikat pada hubungan emosional dengan ideology tertentu. Dengan begitu pemilih dewasa harapan mendapatkan suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideology atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka.

### 3. Pemilih Orang Tua (50 Tahun ke atas) Rata-rata terdiri dari 10- 20 persen pemilih.

Mereka yang tidak banyak lagi mendapatkan pengetahuan politik dan bahkan tidak tahu pemimpin dan kepemimpinan karena usianya. Sehingga mereka kurang menilai segala penyelewengan, padahal partai/figure yang didukungnya melakukan apa saja yang sewenang-wenang. Karena usia mereka tidak dapat menegur atau memperbaiki kesalahan-kesalahan figure/partai, karena mereka lebih cenderung pasrah. Dan akhirnya pemilih Tua akan mudah diarahkan untuk tujuan suara atau memilih. Dari definisi dan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ciri-ciri pemilih pemula yaitu

- a. Warga Negara Indonesia yang telah genap usia 17 (tujuh belas ) Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
- b. Baru pertama kali mengikuti pemilihan umum (memberikan hak suara) sejak pemilu diselenggarakan
- c. Mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT pemilu 2017

Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan Kepala Daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang antara lain Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan wakil Walikota untuk Kota. Menurut Sudiharto (Yoyoh Rohania & Efriza 2015:440) mengatakan pemilu adalah sarana penting dalam Demokrasi, karena pemilu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyak jumlah warga Negara, sehingga mereka harus menunjukan wakil untuk kehidupan Negara. Menurut Gaffar (2012 :85) menyatakan bahwa melalui pemilukada masyarakat dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandate seorang Kepala Daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemilu, pilkada harus dilakukan secara demokrasi sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Paiman Napitupulu (Yoyoh Rohania & Efriza, 2015:439) pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan. Seluruh rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Jadi melalui pemilu rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang

mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperhensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor 1992 dalam Wiratna Sujarweni 2014:6).

Fokus dalam penelitian ini adalah Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow (Studi di Kecamatan Dumoga Timur) dengan menggunakan teori Miriam Budiardjo yaitu partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pemberian suara atau (Voting)
2. Diskusi Politik
3. Menghadiri rapat umum/kampanye

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Yang diambil sebagai informan adalah orang yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian, kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan jumlah informan 17 orang, dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pemilih pemula
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Bolaang Mongondow
3. Tokoh Agama
4. Tokoh Masyarakat
5. Ketua PPK Kecamatan Dumoga Timur

## Hasil Penelitian

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilihan Kepala Daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan secara aktif, dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan Kepala Daerah. Partisipasi politik seseorang tentunya tampak dilihat dari aktivitas-aktivitas politik yang mereka lakukan baik secara konvensional maupun non-konvensional, begitu pula dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Dumoga Timur terutama bagi pemilih pemula, ada berbagai macam kegiatan atau aktivitas politik yang mereka lakukan menjelang dan pada saat hari H pemungutan suara pemilukada di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017. Miriam Budiardjo (Anwar Arifin 2015:7) mengatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan public (public policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri

rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Dalam demokrasi, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh rakyat dan untuk menentukan siapa yang berwenang untuk mewakili rakyat, maka diadakan pemilihan umum. Pemilih pemula yang sebelumnya hanya menjadi penonton proses politik pemilihan Kepala Daerah, kini mereka telah menjadi bagian dari proses penentuan calon, dan kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang Kepala Daerah yang akan memajukan daerahnya. Pemilihan umum Kepala Daerah ini juga merupakan sarana perwujudan partisipasi politik rakyat. Partisipasi politik itu sendiri dapat dijabarkan melalui aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat seperti pengumutan suara untuk memilih wakil rakyat ataupun Kepala Negara, itu merupakan bentuk yang paling mudah kita kenali. Pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2017 merupakan rangkaian pesta demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak heran kalau masyarakat yang ada di Kecamatan Dumoga Timur begitu antusias dalam menyaksikan pesta demokrasi tersebut tidak terkecuali dari kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai bagian yang penting dalam suksesnya pemilu secara langsung. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh para pemilih pemula tidak berbeda dengan aktivitas masyarakat yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara dengan

informan-informan yang menunjukkan semua informan yang diwawancarai oleh peneliti menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2017. Mereka melakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena kesadaran politik sebagai warga Negara yang baik, karena penilaian mereka terhadap pasangan calon dan ada juga karena pemilu tahun 2017 merupakan pengalaman pertama bagi mereka dalam memilih.

## Kesimpulan

1. Dalam pemberian suara pemilih pemula di Kecamatan Dumoga Timur yang begitu antusias untuk berpartisipasi dalam pemberian hak suara secara langsung, walaupun dalam mereka mengambil keputusan dalam memilih yang hanya sekedar ikut-ikutan dengan pihak keluarga maupun teman-teman terdekat, namun mereka tidak mau melewatkan momen yang ada karena bagi mereka ini adalah pengalaman pertama untuk memilih.
2. Pemilih pemula di Kecamatan Dumoga Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mereka sering membicarakan masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa politik menjelang pemilu dengan teman-teman yang ada disekitar mereka, dan hal itulah terlihat bahwa pemilih pemula di Kecamatan Dumoga Timur mulai aktif dalam berdiskusi mengenai masalah politik.
3. Partisipasi politik pemilih pemula tidak hanya memberikan suara dalam pemilu. Pemilih pemula di Kecamatan Dumoga Timur juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan sendiri maupun diajak oleh orang terdekat.



## Saran

1. Pemilih pemula hendaknya lebih membuka diri dan lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan politik, karena dengan begitu pemilih pemula dapat menambah wawasan tentang politik dan menjadi sarana pembelajaran tersendiri selain belajar disekolah dan dikampus.
2. Penyelenggara pemilu harus baik dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengumutan Suara (PPS) hingga Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara (KPPS) agar lebih mensosialisasikan akan pentingnya pendidikan bagi para pemilih terlebih bagi pemilih pemula.
3. Partai politik agar lebih aktif dalam mengadakan pendidikan politik secara langsung dengan masyarakat terlebih pemilih pemula sehingga dapat mendengar aspirasi mereka, dan juga visi misi, dan program dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A, 2015. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar. M, J, 2012. Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mz Holizon, R.2015 Pilkada Penuh Euforia Miskin Makna. Jakarta: Bestari.
- Rush, M dan Phillip A. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Rohania, Yoyoh dan Efriza. 2015. Pengantar Ilmu Politik. Kajian Mendasar Ilmu Politik. Malang: IntransPublishing.
- Samuel P. H dan Joan N, 2010 Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinaga, R, S. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitepu, A, P. 2012. Teori-Teori Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujarweni, W, V. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PB Pustaka BaruPers.
- Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.

## Sumber-sumber Lain

- Kantor Kecamatan Dumoga Timur  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum